

## **IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG**

**<sup>1</sup>Bima Bayu Aji, Ari Subowo<sup>2</sup>**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: [Bimabay17@gmail.com](mailto:Bimabay17@gmail.com)

### **Abstrak**

Kota Lama Semarang merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Tingginya minat wisatawan yang mengunjungi Kawasan Kota Lama Semarang merupakan salah satu prestasi bagi Pemerintah Kota Semarang. Dulunya Kawasan Kota Lama Semarang terkenal dengan Kawasan yang kumuh dan kriminalitasnya yang tinggi, maka dari itu Pemerintah Kota Semarang membuat suatu program yaitu merevitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi program revitalisasi pada objek wisata Kawasan Kota lama Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata Kota Semarang dan dibantu oleh BPK2L ke Kementrian PUPR pusat berhasil dengan wajah baru Kawasan Kota Lama Semarang yang sekarang, namun ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang masih perlu diperhatikan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Program Revitalisasi, Kawasan Kota lama

## **IMPLEMENTATION OF THE REVITALIZATION PROGRAM ON KOTA LAMA SEMARANG**

**<sup>1</sup>Bima Bayu Aji, Ari Subowo<sup>2</sup>**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

E-mail: [Bimabay17@gmail.com](mailto:Bimabay17@gmail.com)

### **Abstrack**

Kota Lama Semarang is one of the tourist objects that is visited by many local and foreign tourists. The high interest of tourists visiting the Kota Lama Semarang area is one of the achievements of the Semarang City Government. Formerly the Kota Lama Semarang area was famous for its slum areas and high crime, therefore the Semarang City Government made a program that is to revitalize the Kota Lama Semarang area. The purpose of this research is to see how the implementation of the revitalization program in tourist objects of the Kota Lama Semarang area. This study used a qualitative-descriptive approach with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the proposal of the Semarang City Government through the Semarang City Tourism Office and assisted by BPK2L to the central PUPR Ministry succeeded with the new face of the Semarang Old City Area now, but there are several variables that affect the success of the revitalization program in the Kota Lama Semarang area, namely communication. , resources, disposition, and bureaucratic structure that still need attention.

**Keywords:** Policy Implementation, Revitalization Program, Kota Lama Area

## PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia mulai menunjukkan perkembangannya yang sangat signifikan pada tahun 1990-an. Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia berdasarkan antusias masyarakat di negara-negara maju di Eropa, AS, Jepang dan Australia yang memiliki ekonomi relatif tinggi serta amat ketat dalam memanfaatkan waktu luang.

Kota Semarang merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya objek wisata di Kota Semarang dan banyaknya wisatawan Nusantara dan wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Semarang.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Jumlah Kunjungan**  
**Wisatawan ke Kota Semarang pada**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Target	Realisasi
2014	2.061.678	4.007.736
2015	2.185.379	4.376.359
2016	4.660.822	4.760.822
2017	4.987.080	5.024.476
2018	5.361.111	5.769.389

*Sumber: Arsip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dengan obyek wisata yang cukup

banyak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan asing dari tiap tahun ke tahun. Realisasi jumlah kunjungan wisatawan juga telah melampaui target yang ditentukan.

Kota Lama Semarang merupakan Kawasan yang pada mulanya menjadi pusat pemerintahan di Kota Semarang oleh Belanda. Selain itu Kawasan Kota Lama Semarang jika dilihat dari sejarah merupakan cikal bakal dari pembangunan yang ada di Kota Semarang pada saat ini. Kawasan Kota Lama Semarang ini memiliki luas sekitar  $\pm$  31 ha. Kawasan tersebut dulunya merupakan pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan, dengan bangunan-bangunan yang indah dan mengandung nilai sejarah yang kini tak berfungsi secara optimal. Sebagian besar bangunan terlihat tak terawat, berkesan tidak berpenghuni bahkan seakan-akan seperti Kota mati karena sepi wisatawan yang mengunjungi objek wisata tersebut.

Melihat kondisi yang terjadi di Kota Lama Semarang itu, maka usaha untuk melestarikan dan meningkatkan kondisi baik fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi di Kota Lama Semarang, salah satunya yaitu dengan menghidupkan kembali Kota Lama Semarang dengan pengembangan Kawasan Kota Lama Semarang dalam rangka merevitalisasi Kota Lama Semarang.

Revitalisasi merupakan upaya untuk menghidupkan kawasan, bangunan-bangunan, dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural. Secara umum revitalisasi mempunyai makna sebagai pengembalian kembali kawasan dengan memasukan fungsi atau kegiatan baru secara modern, agar kawasan tersebut menjadi lebih aktif.

Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang mulai dikerjakan pada Tahun 2017 dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang membantu Walikota Semarang mendorong dengan adanya perubahan di Kawasan yang mempunyai banyak nilai sejarah tersebut. Revitalisasi disertai dengan memanfaatkan Gedung-gedung tua di Kawasan Kota Lama Semarang sebagai Kawasan ekonomi dan bisnis. Gedung tersebut dimanfaatkan dan menjadi perkantoran, restoran, cafe, bahkan tempat wisata yang jauh dari kesan kumuh dan rawan terhadap kriminalitas. Selain itu bangunan lain juga di manfaatkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai galeri seni dan tempat untuk pameran produk UMKM, guna lebih memperkenalkan potensi UMKM yang ada di Kota Semarang terhadap pengunjung Kota Lama.

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Revitalisasi Kota Lama Kota Semarang Pada Tahap I dan Tahap II**

No	Anggaran Revitalisasi Kota Lama Kota Semarang	
1.	Tahap I	Rp. 156.372.608.000
2.	Tahap II	Rp. 64.143.267.073

*Sumber: Arsip Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman wilayah Jawa Tengah*

Pada revitalisasi Kota Lama Tahap I Pemerintah Kota Semarang yang dibantu oleh BPK2L dan Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya melakukan penataan Kawasan Kota Lama Semarang agar lebih nyaman dan dapat dijadikan sebagai objek wisata yaitu meliputi penataan sarana dan prasarana seperti saluran PDAM, kabel telepon, serta listrik. Selain itu juga ditambah dengan tempat duduk panjang, tempat sampah, dan lampu penerangan jalan utama serta trotoar, program revitalisasi tahap I Kota Lama Semarang dimulai pada tahun 2017. Permasalahan revitalisasi di Kota Lama Semarang pada tahap satu yaitu sulitnya mensterilkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Kawasan Kota Lama dan masih banyaknya aktifitas premanisme dan bahkan prostitusi yang merupakan masalah terbesar dan tantangan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka merevitalisasi Kawasan Kota Lama Tersebut.

Program revitalisasi merupakan bagian strategi dan program kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang. Revitalisasi itu sendiri juga merupakan upaya pemberdayaan potensi Kota Semarang sebagai salah satu kawasan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan aset-aset Pemerintah Kota Semarang. Keberhasilan suatu program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang tentu tidak akan luput dari sebuah perencanaan matang yang melalui berbagai tahapan, demi terciptanya suatu kondisi yang diinginkan.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalahnya antara lain: (1) Bagaimana proses implementasi program revitalisasi objek wisata Kawasan Kota Lama Semarang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (1988:29) mengemukakan bahwa administrasi publik itu sendiri yaitu merupakan suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan,

dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Disini mereka juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur kebijakan public untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang lainnya. Secara sederhana administrasi publik juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan suatu organisasi public dan termasuk mengenai birokrasi untuk menciptakan *good governance*.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi, memiliki peran yang penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:
  - a) Transmisi
 

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah

adanya salah pengertian (*misscommunication*).

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan, ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana atau *stakeholders* membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya, yang diperlukan dalam implementasi berwujud sumber daya manusia, financial, dan fasilitas fisik. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, Edward III, Indikator sumber daya terdiri dari:

a) Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas

atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi, adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut adalah:

a) Pengaturan birokrasi

Dalam konteks ini Edwards III mensyaratkan bahwa suatu implementasi kebijakan harus

dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Hal Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

b) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi suatu masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau

direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

a) *Standar Operating Prosedures* (SOP)

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan atau administrator maupun birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

b) Fragmentasi

Adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dengan tujuan menganalisis implementasi program revitalisasi di kawasan kota lama Semarang. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber pustaka. Penelitian ini melakukan pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang**

Terkait hasil penelitian program revitalisasi di objek Kawasan Kota Lama Semarang yang membahas bagaimana pengelola objek wisata Kawasan Kota Lama Semarang yaitu BPK2L yang dibantu oleh Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata Kota Semarang yang saat ini Kawasan Kota Lama Semarang menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Semarang dan sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Sehingga di tahun 2019 Kawasan Kota Lama Semarang menjadi salah satu destinasi wisata dengan pengunjung yang cukup tinggi di Kota Semarang.

Keberhasilan program revitalisasi merupakan salah satu faktor yang penting



guna untuk menilai apakah kepariwisataan di suatu objek wisata dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang itu sendiri terdiri dari 2 tahap dimana pada tahap 1 sudah selesai di tahun 2019 lalu, dan tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2021 awal tahun nanti. Program revitalisasi itu sendiri merupakan usulan dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata Kota Semarang ke Kementerian PUPR pusat dan yang melaksanakan program tersebut Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah dan dibantu oleh BPK2L.

### **1. Komunikasi**

Proses implementasi program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang memerlukan penyaluran komunikasi maupun koordinasi yang baik guna menghasilkan kesuksesan program yang baik pula. Namun masih terdapat miskomunikasi yang terjadi pada permasalahan revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang, salah satunya terjadi diantara Pemerintah Kota Semarang dengan pelaku usaha yang ada disekitar Kawasan Kota Lama Semarang. Miskomunikasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Semarang dengan pelaku

usaha disebabkan karena penyelesaian revitalisasi di Kawasan Kota Lama yang tidak tepat waktu dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait terlambatnya penyelesaian revitalisasi pada tahap 1.

### **2. Sumberdaya**

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan merupakan staf atau pegawai, kegagalan dalam implementasi kebijakan juga disebabkan oleh staf yang kurang memadai atau tidak mencukupi maupun kurang berkompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor pun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan kecukupan staf dengan kemampuan atau keahlian yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang melibatkan beberapa staf yang diperlukan, yaitu dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Kota Semarang, dan BPK2L, serta PT Abipraya sebagai kontraktor dalam pembangunan revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Pada saat program revitalisasi Tahap 1 dilaksanakan dibutuhkan kurang

lebih 300 staf yang terlibat yang terdiri dari manajemen dan pekerja, hal ini di sampaikan oleh pelaksana revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Sejauh ini dengan menurunkan sekitar 300 staf dalam pelaksanaan program revitalisasi sudah cukup untuk menjalankan tugas tersebut, walaupun belum bisa dikatakan revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang berhasil sepenuhnya karena revitalisasi tahap 2 belum dilakukan lebih lanjut.

Pada saat revitalisasi di Kawasan Kota Lama dilaksanakan harus ada pengawasan dari pihak Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, BPK2L, dan Dinas Pariwisata agar meminimalisir terjadinya mis komunikasi pada saat pembangunan dilaksanakan.

### **3. Disposisi**

Menurut Edwards III disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan. Jika suatu kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan namun harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.

Maka terdapat dua hal yang harus dicermati dalam variabel ini, yaitu pengaturan birokrasi yang merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga melakukan pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal. Selain itu juga memperhatikan insentif yang menyatakan bahwa salah satu cara yang mungkin menjadi faktor pendorong untuk pelaksana kebijakan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pribadi maupun organisasi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa dalam proses implementasi revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang banyak melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait. Terdapat 3 pihak yang berperan besar yaitu Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Dinas Pariwisata Kota Semarang, dan BPK2L. Disposisi yang jelas harus dikoordinasikan dengan baik agar setiap *stakeholders* yang terkait dapat melakukan tugasnya dan implementasi berjalan sinergis.

Melalui koordinasi masing-masing *stakeholders*, kemudian melaksanakan

program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Kegiatan dalam hal ini diantaranya adalah:

**Tabel 4.1**

**Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang Menurut Tugasnya**

No.	Program	Instansi
1.	Penataan ulang dan peningkatan kualitas kawasan Kota Lama Semarang: a. Taman Sri Gunting b. Koridor Jl. Letjen Soeprतो c. Koridor Mpu Tantular d. Polder tawang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya</li> <li>• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.	Menyiapkan museum khusus Kota Lama yang jelas, dan fleksibel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• BPK2L</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan</li> </ul>
3.	Menyusun program kemitraan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang Kawasan Kota Lama Semarang: a. Komunitas b. Seniman c. Akademisi d. Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• BPK2L</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Kementerian PUPR Dirjen Penataan Ruang, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga</li> </ul>
4.	Panduan beraktivitas bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• BPK2L</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>
5.	Menyiapkan rencana strategis di Kawasan Kota Lama Semarang: a. Kegiatan wisata di Kawasan Kota Lama Semarang b. Sosialisasi manfaat kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kota Semarang</li> <li>• BPK2L</li> <li>• Akademisi</li> <li>• Kementerian PUPR Dirjen Penataan</li> </ul>

Sumber: *Arsip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*

Dalam pelaksanaan implementasi program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang terdapat 3 instansi yang menjadi tumpuhan guna menyukseskan program tersebut. Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2003 tentang pembentukan BPK2L (Badan

Pengelola Kawasan Kota Lama) yang diberikan kewenangan secara khusus untuk menjadi pengelola adalah BPK2L itu sendiri. BPK2L adalah lembaga non struktural yang bertanggung jawab langsung terhadap walikota.

#### 4. Struktur Birokrasi

Dalam program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang terdapat rencana tentang pemanfaatan bangunan kantor untuk BPK2L dengan cara mengkonversikan salah satu bangunan lama yang ada di Kawasan Kota Lama, namun hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasi hal tersebut menjadi salah satu kendala BPK2L dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini BPK2L masih menyewa gedung-gedung milik swasta guna mengadakan pertemuan. Keberadaan BPK2L sebagai lembaga non struktural yang dibentuk secara khusus untuk mengelola Kawasan Kota Lama Semarang yang bertanggung jawab langsung kepada walikota bersifat sebagai lembaga koordinatif dan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait (Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dan Dinas Pariwisata) kepengurusan BPK2L melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah,

swasta, komunitas, akademisi dan praktisi yang ada di Kota Semarang. Sebagian pengurus beranggotakan pelaku usaha dan pemilik gedung yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang guna meningkatkan nilai investasi di kawasan tersebut.

Melihat Kawasan Kota Lama dengan bangunannya yang mengandung nilai historis yang tak ternilai, hal ini cukup menjadikan kawasan ini sebagai warisan sejarah dan budaya Kota Semarang sekaligus menjadi tujuan wisata. Saat ini kawasan Kota Lama telah dijadikan warisan Kota pusaka dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Kawasan Kota Lama Semarang memiliki nilai budaya yang penting dan istimewa, memiliki nilai yang penting juga pada masyarakat kini maupun mendatang.

Dalam melakukan pengembangan Kota Lama sebagai tujuan wisata peran Dinas Pariwisata Kota Semarang adalah pengawasan dan membuat program yang bertujuan untuk mensosialisasikan program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang, diantaranya:

**Tabel 4.3**

**Kegiatan Wisata Rutin yang diadakan Dinas Pariwisata Kota**

**Semarang di Kawasan Kota Lama  
Semarang**

No	Kegiatan
1.	Pasar Semawis
2.	Karnaval budaya dan Pawai ogoh-ogoh
3.	Semarang <i>Night Carnival</i>
4.	Taman Garuda <i>Art Festival</i>
5.	Festival Kota Lama
6.	Symphoni Kota Lama
7.	Keroncong Generasi
8.	Tahoen Baroe Van Kota Lama

Sumber: *Arsip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*

Kalender kegiatan wisata tersebut dibentuk oleh Dinas Pariwisata agar melibatkan masyarakat Kota Semarang dan wisatawan guna mensosialisasikan program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Selain itu Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan bersama dengan komunitas yang ada di Kota Semarang di Kawasan Kota Lama Semarang, harapannya terdapat proses timbal balik dari Pemerintah Kota Semarang ke masyarakat dan sebaliknya guna menghidupkan kembali kawasan

Kota Lama Semarang sebagai tujuan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan dan seluruh masyarakat Kota Semarang. Dinas Pariwisata membantu memberikan pendampingan terhadap komunitas yang ingin melakukan kegiatan di sekitar kawasan Kota Lama Semarang sehingga dapat memberikan nilai yang baik bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

BPK2L sebagai pengelola Kawasan Kota Lama juga belum mendapatkan kantor resminya, sedangkan anggota PBK2L berisikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, PUPR Dirjen Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamung Praja, dan pelaku usaha yang memiliki bangunan di Kawasan Kota Lama. Sehingga mempersulit anggota BPK2L untuk melakukan pertemuan yang akan dilakukan guna membicarakan hal hal mengenai pengembangan Kawasan Kota Lama Semarang. Implementasi Program Revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang meliputi:

- a. Peran staf dari Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Jawa Tengah, BPK2L, Dinas Pariwisata Kota Semarang sangat dibutuhkan

untuk mencapai keberhasilan program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang pada tahap 1 maupun tahap 2.

- b. Informasi terkait destinasi wisata di Kawasan Kota Lama Semarang merupakan bagian penting untuk menarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Hal ini dapat dilihat dari adanya inovasi berupa aplikasi Kota Lama yang tujuannya mempermudah akses wisatawan serta bagaimana sejarah Kota Lama di dirikan.
- c. Peran Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata Kota Semarang yang dibantu oleh Kementrian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Jawa Tengah serta BPK2L merupakan pondasi yang penting agar program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang berjalan dengan baik.
- d. Sarana dan Prasarana merupakan penunjang keberhasilan program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Banyak sekali sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya yaitu pengerjaan struktur bangunan dan jalan paving di

Kawasan Kota Lama Semarang serta penambahan *street furniture* di area Kawasan Kota Lama Semarang.

- e. Hubungan antara instansi terkait dengan para pemilik gedung dan pemilik usaha sudah dilakukan namun belum optimal. Setiap instansi memiliki perannya masing-masing guna mewujudkan program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang dan tidak bergantung pada satu instansi saja.
- f. Disposisi terhadap implementor program revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang khususnya BPK2L dan *stakeholders* yang terkait sudah berupaya dalam mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, komunitas, investor, swasta, dan wisatawan. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan revitalisasi dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga harus mendapatkan timbal balik dari masyarakat.

### **Saran**

1. Mengkonversikan salah satu gedung yang ada di Kawasan Kota Lama

Semarang sebagai kantor resmi untuk BPK2L bekerja, sehingga tidak terjadi miskomunikasi bagi masyarakat maupun komunitas yang ingin melakukan pertemuan dengan pihak BPK2L.

2. Masih perlu adanya persamaan persepsi melalui sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi yang perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada *stakeholders* yang terkait, masyarakat, pemilik gedung, dan swasta.
3. Mengajak pemilik gedung atau pemilik bangunan dan melibatkan para pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan renovasi bangunannya.
4. Perlu adanya sosialisasi kembali (*rebranding*) dari adanya revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang melalui kegiatan atau event sebagai dorongan bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi Kawasan Kota Lama Semarang.

## REFERENSI

### Buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.

Frank Fischer; Gerald J. Miller; Mara S. Sidney (2014). *Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.

Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.

Yeremias T. Keban (2008). *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

### Jurnal

Citra Natalia, 2019. *Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Upaya City Branding Di Kota Semarang*

G.A Khrista, 2019 *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu*

Hutsa Adit Galang, 2017. *Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang*

Junaid Ilham, Mansyur, 2019 *Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur*

Pallewa Agustina, 2018 *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara*

Putri Mediana Shafira, Deliarnoor Alamsyah Nandang 2019 *Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan*

*Kawasan Geopark (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh)*

Rusdyananingsih Eva, Ribawanto Heru, 2019 *Implementasi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Budaya Terkemuka (Studi pada Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*

Sulistyo, Wiwik, Puji, 2013. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Dan Konservasi Bangunan Bersejarah Kawasan Kota Lama di Kota Semarang*

### **Sumber lain**

<http://lpse.pu.go.id>

<https://www.google.com/maps/place/Kawasan+Kota+Lama/@-6.968393,110.4259159,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e70f35644197e21:0xf69420970b7a9558!8m2!3d-6.968393!4d110.4281046>

Keputusan Walikota Semarang No 050/312 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Masa Bhakti 2018-2023

Keputusan Walikota Semarang No 50/204 Tahun 2016 Perubahan atas keputusan Walikota Nomor 053/602 Tahun 2013 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Masa Bhakti 2013-2018.

Keputusan Walikota Semarang No 646/7 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang 2011-2013.

Penyusunan Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan RTBL Situs Kota Lama Semarang Tahun 2020

Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.